

# **PERKEMBANGAN PERATURAN BAWASLU TAHUN 2018**

## **A. DASAR HUKUM PENYUSUNAN, RAPAT KONSULTASI, DAN PENGHARMONISASIAN PERATURAN BAWASLU**

### **Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**

#### **Pasal 93**

Bawaslu bertugas:

- a. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;

#### **Pasal 145**

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, Bawaslu membentuk Peraturan Bawaslu dan menetapkan keputusan Bawaslu.
- (2) Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bawaslu Provinsi dapat menetapkan keputusan dengan berpedoman pada Peraturan Bawaslu.
- (4) Dalam hal Bawaslu membentuk Peraturan Bawaslu, Bawaslu wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat.

### **Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan**

#### **Pasal 2**

- (1) Perancang harus melakukan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural.
- (2) Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu tahapan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 5**

- (1) Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang dilakukan melalui permohonan secara tertulis dari Pemrakarsa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
  - a. naskah urgensi atau gambaran umum arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan; dan
  - b. Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural.

## REKAPITULASI PENGUNDANGAN PERATURAN BAWASLU TAHUN 2018

NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS	KETERANGAN
1	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 17 Januari 2018  Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 25 Januari 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 174	Mencabut Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2015 dan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2016
2	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua, dan Papua Barat	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 17 Januari 2018  Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 25 Januari 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 175	-
3	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal  Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 25 Januari 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176	Mencabut Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2012
4	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal  Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 25 Januari 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 177	-
5	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rapat Pleno	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 25 Januari 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor	Mencabut Ketentuan mengenai Rapat Pleno dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2015

NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS	KETERANGAN
6	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 13 Februari 2018  Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 13 Februari 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254	-
7	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 26 Februari 2018  Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 28 Februari 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324	Mencabut Ketentuan mengenai Penanganan Pelanggaran Pemilu dalam Perbawaslu 11 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu No. 2 Tahun 2015
8	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 26 Februari 2018  Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 28 Februari 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 325	-
9	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 26 Februari 2018  Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 28 Februari 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 326	-
10	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 5 Maret 2018	Merubah Perbawaslu Nomor 19 Tahun

NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS	KETERANGAN
	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara	Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 7 Maret 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350	2017
11	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 5 Maret 2018 Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 7 Maret 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 351	Merubah Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2017
12	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil WaliKota	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 5 Maret 2018 Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 14 Maret 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 372	Merubah Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2017
13	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 16 Maret 2018 Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 20 Maret 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 391	Mencabut Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2016
14	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil WaliKota	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 16 Maret 2018 Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 20 Maret 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 392	Mencabut Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2015 dan Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2016

NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS	KETERANGAN
15	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 16 Maret 2018  Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 20 Maret 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 393	Mencabut Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2013
16	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 7 Mei 2018  Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 22 Mei 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666	Mencabut Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2013
17	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Negeri	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 7 Mei 2018  Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 22 Mei 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 667	Mencabut Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2014
18	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 21 Juni 2018  Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 22 Juni 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 787	Merubah Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017
19	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 20 Juni 2018  Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 22 Juni 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor	-
20	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 4 Juli 2018  Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal	Mencabut Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16,

NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS	KETERANGAN
		9 Juli 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869	dan Pasal 17 dalam Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014
21	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 4 Juli 2018  Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 9 Juli 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870	Mencabut Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 dan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015
22	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 4 Juli 2018  Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 9 Juli 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871	
23	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 11 Juli 2018  Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 18 Juli 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907	Mencabut Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2013
24	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 31 Juli 2018  Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 1 Agustus 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017	Mencabut Perbawaslu No. 7 Tahun 2013 dan Perbawaslu No. 13 Tahun 2014
25	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengawasan	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 3 Agustus 2018	Mencabut Perbawaslu No. 14

NO.	JUDUL PERATURAN	STATUS	KETERANGAN
	Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 9 Agustus 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1058	Tahun 2014
26	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 6 Agustus 2018  Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 9 Agustus 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1059	-
27	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 13 Agustus 2018  Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 15 Agustus 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1098	-
28	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 10 September 2018  Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 14 September 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1281	Mencabut Perbawaslu No. 6 Tahun 2014 dan Perbawaslu No. 17 Tahun 2014
29	Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 20 September 2018  Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 21 September 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1302	Mencabut Perbawaslu No. 2 Tahun 2014 dan Perbawaslu No. 16 Tahun 2014

## B. RANCANGAN PERBAWASLU TAHAPAN

NO.	JUDUL PERATURAN	NASKAH KAJIAN	PEMBAHASAN	RDP	HARMONISASI
1	Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum	ADA	Finalisasi Penyusunan Rancangan Perbawaslu	Telah dilakukan RDP	Diagendakan untuk dilakukan Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM
2	Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum	ADA	Finalisasi Penyusunan Rancangan Perbawaslu	Belum dilakukan RDP	Diagendakan untuk dilakukan Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM
3	Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu	ADA	Finalisasi Penyusunan Rancangan Perbawaslu	Belum dilakukan RDP	Diagendakan untuk dilakukan Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM
4	Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum	BELUM ADA	Pembahasan Rancangan Perbawaslu	Telah dilakukan RDP	Belum diagendakan Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM
5	Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum	BELUM ADA	Pembahasan Rancangan Perbawaslu	Telah dilakukan RDP	Belum diagendakan Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM
6	Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Pengawasan Penetapan Hasil Pemilihan Umum	BELUM ADA	Pembahasan Rancangan Perbawaslu	Telah dilakukan RDP	Belum diagendakan Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM

### C. RANCANGAN PERBAWASLU NON TAHAPAN

NO.	JUDUL PERATURAN	NASKAH KAJIAN	PEMBAHASAN	HARMONISASI	KETERANGAN
1	Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Ad Hoc	ADA	Finalisasi Rancangan Perbawaslu	Belum diagendakan Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengajuan Rancangan Perbawaslu ke DKPP untuk mendapatkan masukan
2	Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	ADA	Finalisasi Penyusunan Rancangan Perbawaslu	Diagendakan untuk dilakukan Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM	Perlu mengundang Kementerian PAN&RB serta Kementerian Hukum dan HAM
3	Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip	ADA	Finalisasi Penyusunan Rancangan Perbawaslu	Diagendakan untuk dilakukan Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM	Perlu dilakukan finalisasi dengan unit Pemrakarsa

### D. RANCANGAN PENERJEMAHAN PERATURAN BAWASLU

NO.	JUDUL PERATURAN	PEMBAHASAN	KETERANGAN
1	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum	Finalisasi Penerjemahan Rancangan Perbawaslu	Perlu dilakukan pembahasan penerjemahan Lampiran Peraturan Bawaslu